



KABUPATEN BOYOLALI

**RENCANA STRATEGIS  
( RENSTRA )  
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI  
TAHUN 2021 - 2026**



**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
Kompleks Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali  
Jl. Dr. Soepomo, Kompleks Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali  
Telp. (0276) 321941, Faks. (0276) 325203  
Boyolali 57321, Provinsi Jawa Tengah

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : M. Syawalludin, AP, M.Si

NIP : 19741030 199603 1 001

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali

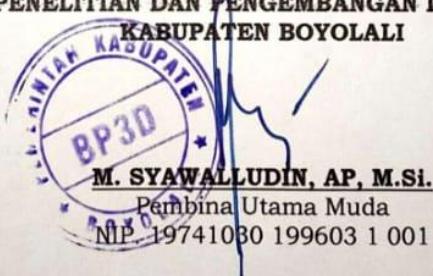
Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali, untuk mewujudkan visi dan misi serta program kerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boyolali, September 2021.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI**



## **DAFTAR ISI**

<b>LEMBAR PERYATAAN</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	10
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH</b>	<b>11</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	52
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	<b>56</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	56
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	58
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	66
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	74
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	79
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>81</b>
4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	81

<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>84</b>
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>87</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>139</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>147</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Ganbar 1	Keterkaitan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	3
Ganbar 2	Bagan Struktur Organisasi	14

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.2a	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	19
Tabel 2.2b	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon	19
Tabel 2.2c	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan	20
Tabel 2.2d	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	20
Tabel 2.2e	Sarana dan Prasarana BP3D Kabupaten Boyolali	22
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan BP3D Kabupaten Boyolali	25
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	31
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan BP3D Kabupaten Boyolali	56
Tabel 3.2.1	Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Boyolali 2021-2026	60
Tabel 3.2.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	64
Tabel 3.3	Komparasi Capaian Sasaran Renstra BP3D Kabupaten Boyolali Terhadap Sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Sasaran Renstra Kemendagri ( Ditjen Bina Bangda) dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah	73
Tabel 3.4a	Sinkronisasi RTRW Kabupaten Boyolali dengan RPJMD Kabupaten Boyolali dan Renstra PD	76
Tabel 3.4a	Daftar Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Boyolali	78
Tabel 4	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BP3D Kabupaten Boyolali	83
Tabel 5	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	85

Tabel 6	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BP3D Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026	93
Tabel 7	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	139

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tataran Perangkat daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan rencana strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, renstra perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam proses penyusunannya, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BP3D dan pemangku kepentingan.

Renstra perangkat daerah disusun dengan tahapan :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir dan;
- f. penetapan

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah untuk setiap unit kerja daerah. Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan. Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Selain itu, pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional

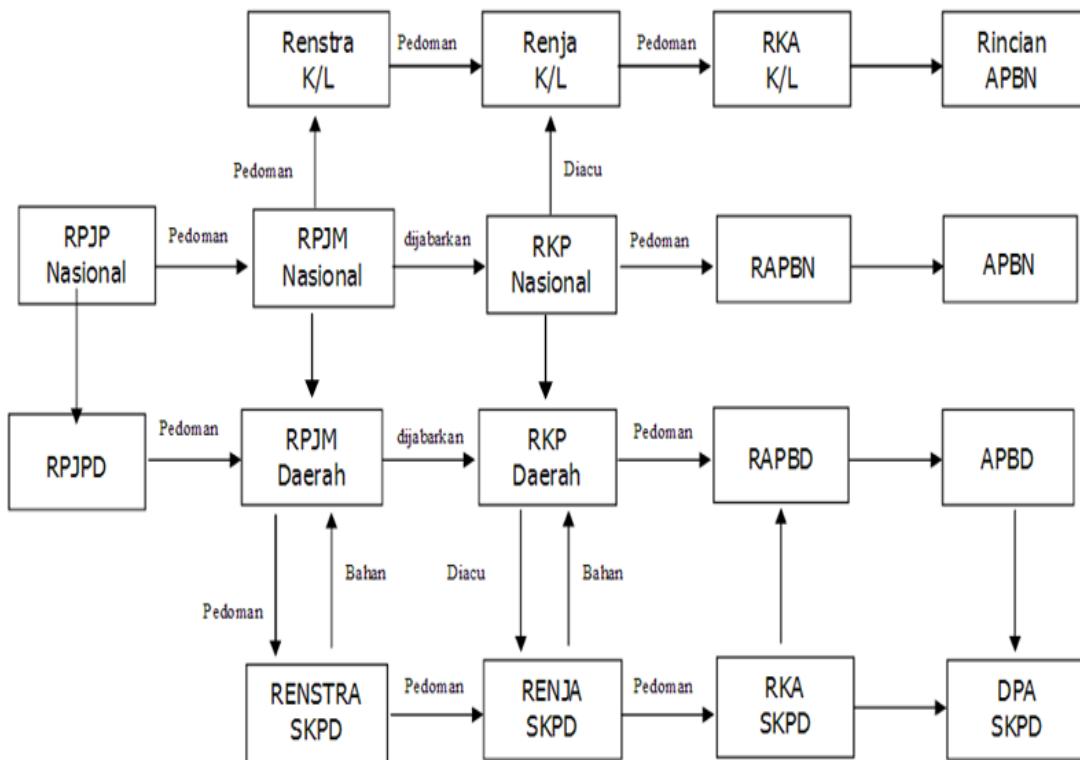
Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Boyolali merupakan dokumen perencanaan lima tahunan sebagai bentuk nyata agar proses perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan selalu mengarah kepada pencapaian visi dan misi daerah. Hal ini dilakukan agar terdapat sinkronisasi dan harmonisasi di dalam menerjemahkan RPJMD ke dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab unit kerja.

Renstra BP3D Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan fungsi penunjang dalam bidang perencanaan pembangunan. Dalam penyusunan Renstra BP3D mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026. Dokumen Renstra tersebut menyajikan agenda utama perencanaaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum

sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunannya dilakukan dengan komitmen dalam menjamin keberlanjutan dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2021-2026. Renstra BP3D Kabupaten Boyolali juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi. Dengan demikian, Renstra BP3D Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja BP3D Kabupaten Boyolali.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan Renstra BP3D Kabupaten Boyolali mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran tercantum dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1  
Keterkaitan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Renstra BP3D) Kabupaten Boyolali 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak- Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor.4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 232);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 224);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 265);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

- Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali; dan
33. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon Pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 adalah untuk memberikan pedoman bagi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali dalam

pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati selama lima tahun ke depan.

Tujuan dari Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 adalah:

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan tahunan;
2. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

#### **1.4 SISTEMATIKA**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN BP3D**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (2021-2026).
- 3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Propinsi.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BP3D KABUPATEN BOYOLALI**

#### **2.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi BP3D**

Berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.

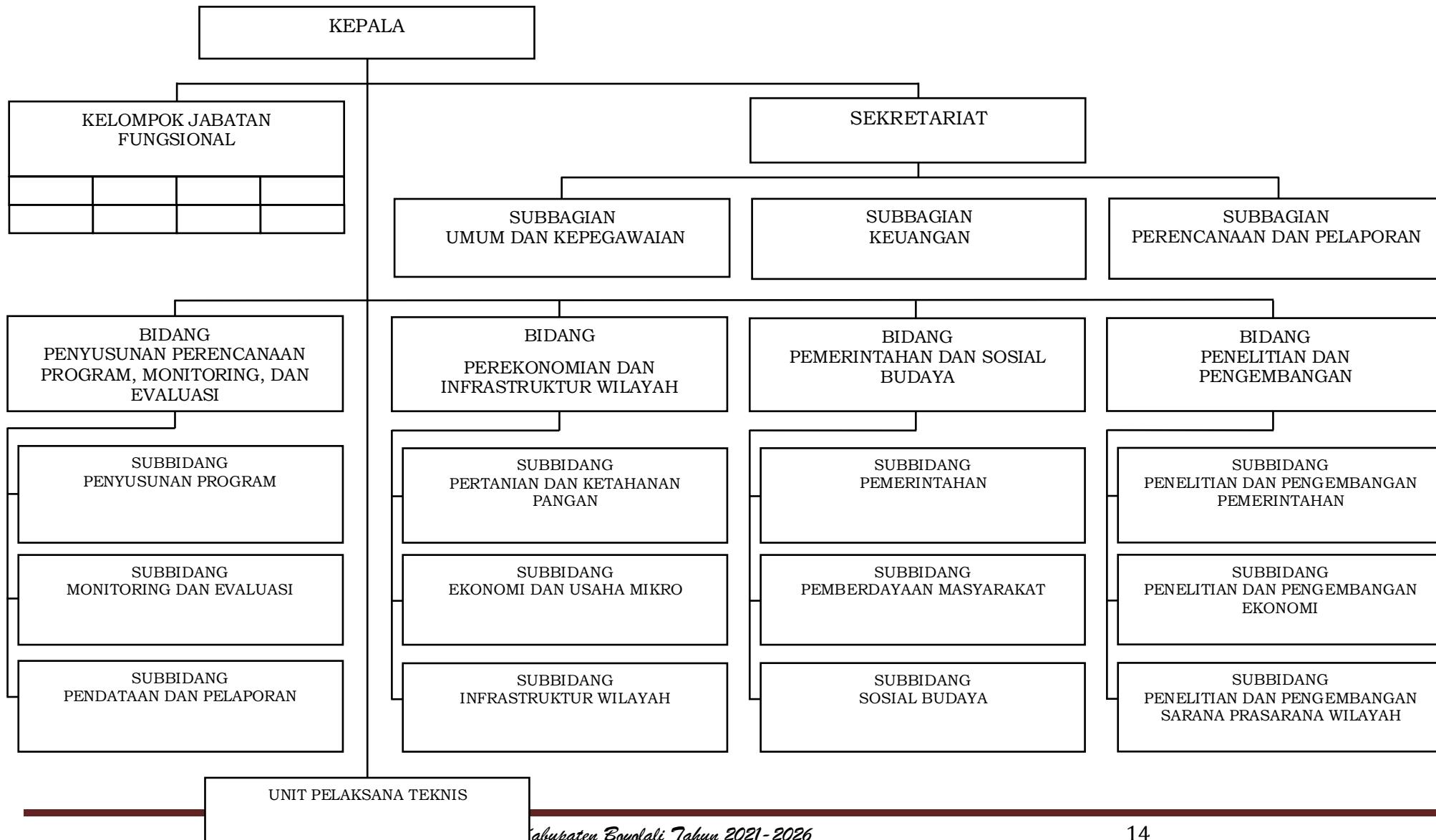
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah, serta mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali terdiri dari Kepala

Badan yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretariat, Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Monitoring, dan Evaluasi, Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang Penelitian dan Pengembangan, dan Jabatan Fungsional. Adapun struktur bagan organisasi sebagaimana Gambar 2.1 sebagaimana berikut

**Gambar 2.1**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI**



Berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali, uraian tugas jabatan eselon pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

1. Kepala BP3D

BP3D mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah; memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah

2. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan dan pelaporan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga, dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Badan. Sekretariat terdiri dari:

- a) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara;
- b) Kepala Subbagian Keuangan yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan;
- c) Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan pelaporan.

3. Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Monitoring, dan Evaluasi mempunyai tugas menghimpun data, menyerasikan, dan mengintegrasikan rencana Perangkat Daerah dan regional guna penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah, melakukan pendataan, pelaporan, monitoring, dan

evaluasi terhadap rencana dan kinerja pembangunan Daerah, menyusun laporan pelaksanaan pembangunan. Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Monitoring, dan Evaluasi terdiri dari :

- a) Kepala Subbidang Penyusunan Program yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penghimpunan data penyusunan program pembangunan guna perencanaan pembangunan Daerah;
- b) Kepala Subbidang Monitoring dan Evaluasi yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas mengumpulkan, menyiapkan, menyusun dan, mengelola data atau informasi melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah, menyusun laporan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan serta hasil pembangunan;
- c) Kepala Subbidang Pendataan dan Pelaporan yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pengumpulan, penyiapan, penyusunan dan pengelolaan data atau informasi melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah, dan menyusun laporan atas hasil pelaksanaan serta hasil kegiatan pembangunan.

4. Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan konsep rumusan kebijakan Daerah di bidang ekonomi dan infrastruktur wilayah yang meliputi urusan pertanian, ketahanan pangan, peternakan, dan perikanan, lingkungan hidup, energi sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, penanaman modal, badan usaha milik daerah, serta melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, penanggulangan bencana, dan kecamatan. Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah terdiri dari :

- a) Kepala Subbidang Pertanian dan Ketahanan Pangan yang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan Daerah yang meliputi urusan pertanian,

- ketahanan pangan, peternakan dan perikanan, dan lingkungan hidup;
- b) Kepala Subbidang Ekonomi dan Usaha Mikro yang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan Daerah yang meliputi urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, penanaman modal, dan badan usaha milik daerah;
  - c) Kepala Subbidang Infrastruktur yang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan Daerah yang meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang, energi sumber daya mineral, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, penanggulangan bencana, dan kecamatan.
5. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kebijakan Daerah di bidang pemerintahan dan sosial budaya yang meliputi ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, sekretariat Daerah, sekretariat dewan, inspektorat, kepegawaian, kearsipan dan perpustakaan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pendidikan, kebudayaan, pemuda olah raga, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya terdiri dari :
- a) Kepala Subbidang Pemerintahan yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyusunan Rencana Kebijakan Pembangunan Daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, sekretariat Daerah, sekretariat dewan inspektorat Daerah, kepegawaian, kearsipan, dan perpustakaan;
  - b) Kepala Subbidang Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyusunan rencana kebijakan Daerah di bidang pemberdayaan

- perempuan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, perlindungan anak, pemeberdayaan masyarakat, dan desa;
- c) Kepala Subbidang Sosial Budaya yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyusunan rencana kebijakan Daerah di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda olah raga, kesehatan, sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk penyusunan bahan kebijakan Daerah di bidang ekonomi, sumber daya alam, pemerintahan, sosial budaya, dan infrastruktur pengembangan wilayah. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
- a) Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan sosial budaya;
  - b) Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi yang dipimpin oleh Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi;
  - c) Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengembangan Wilayah mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang sarana prasarana pengembangan wilayah.

## **2.2 Sumber Daya BP3D**

Untuk melaksanakan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Boyolali didukung dengan ketersediaan sumber daya aparatur, sarana prasarana, serta pengelolaan anggaran. Jumlah pegawai yang bekerja di BP3D sampai dengan bulan September 2021 sejumlah 35 orang, yang terbagi dalam 1 sekretariat dan 4 bidang. Kondisi kepegawaian dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

## 1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali, didukung dengan personil sebanyak 35 orang yang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2a

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Pria	22 orang
2	Wanita	13 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>35 orang</b>

Sumber data : Laporan Kepegawaian September 2021

Susunan atau komposisi pegawai yang dimiliki Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali berdasarkan pangkat/ golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.2b di bawah ini:

Tabel: 2.2b

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala	II-b	1	
2.	Sekretaris	III-a	1	
3.	Kepala Bidang	III-b	4	
4.	Kepala Subbagian	IV-a	3	
5.	Kepala Seksi dan	IV-a	12	
6.	Staf Bappeda	-	14	
7.	Jabatan Fungsional.....	-	-	
<b>Jumlah</b>			<b>35</b>	

Sumber data : Laporan Kepegawaian September 2021

Tabel : 2.2c

## Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	Golongan IV/c	1	
2.	Golongan IV/b	1	
3.	Golongan IV/a	2	
4.	Golongan III/d	13	
5.	Golongan III/c	9	
6.	Golongan III/b	3	
7.	Golongan III/a	4	
8.	Golongan II/b	1	
9.	Golongan II/a	1	
<b>J U M L A H</b>		<b>35</b>	

Sumber data : Laporan Kepegawaian September 2021

Tabel : 2.2d

## Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Pasca Sarjana (S-2)	4	
2.	Sarjana (S-1)	27	
3.	Diploma (D-3)	1	
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	
5.	Sekolah Menengah Pertama	1	
<b>J U M L A H</b>		<b>35</b>	

Sumber data : Laporan Kepegawaian September 2021

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2 dengan jenjang eselon II, BP3D menjalankan fungsi koordinasi dengan Perangkat Daerah (PD) lain. Tiga bidang perencanaan di BP3D (Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Monitoring dan Evaluasi, Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah, dan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya) dan satu bidang penelitian dan pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan bermitra dengan Perangkat Daerah dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh BP3D yaitu

mengoordinasikan seluruh Perangkat Daerah dalam kegiatan perencanaan pembangunan.

Kondisi kepegawaian BP3D Kabupaten Boyolali berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.4. Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan, pendidikan karyawan yang paling banyak adalah S-1, kemudian S-2, dari 38 karyawan BP3D yang menamatkan pendidikan sarjana sebanyak 32 orang, secara prosentase jumlah tersebut lebih dari cukup. Tentu hal ini menjadikan modal dasar dalam menjalankan tugas dan fungsi BP3D sebagai lembaga perencana.

### **Kondisi Sarana dan Prasarana**

Jenis sarana dan prasarana yang secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dan operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh BP3D Kabupaten Boyolali dapat dilihat pada Tabel berikut 196

**Tabel 2.2e  
Sarana dan Prasarana BP3D Kabupaten Boyolali**

No	Uraian Sarpras	Jumlah	Satuan
<b>Alat-alat Angkutan</b>			
1	Stasion Wagon	6	unit
2	Sepeda Motor	19	unit
<b>Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>			
1	Global Positioning System	1	unit
2	Alat Ukur Universal Lain-lain	2	unit
3	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	1	unit
<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>			
1	Rak Besi/Metal	1	unit
2	Rak Kayu	7	unit
3	Filling Besi/Metal	12	unit
4	Filling Kayu	5	unit

No	Uraian Sarpras	Jumlah	Satuan
5	Band Kas	2	unit
6	Lemari Kaca	4	unit
7	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lainnya	10	unit
8	Alat Penghancur Kertas	1	unit
9	Papan Nama Instansi	2	unit
10	Mesin Absensi	1	unit
11	Display	2	unit
12	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	10	unit
13	LCD Projector	9	unit
14	Lemari Kayu	14	unit
15	Rak Kayu	2	unit
16	Meja Rapat	24	unit
17	Meja Reseption	2	unit
18	Kursi Tamu	2	unit
19	Kursi Putar	4	unit
20	Sofa	3	unit
21	Mesin Potong Rumput	1	unit
22	AC Unit	6	unit
23	AC Split	13	unit
24	Alat Dapur Lainnya	2	unit
25	Televisi	4	unit
26	Cassette Recorder	1	unit
27	Sound System	1	unit
28	Wireless	1	unit
29	Camera Video	2	unit
30	Camera Film	3	unit
31	Tustel	4	unit
32	Lambang Garuda Pancasila	2	unit
33	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2	unit
34	Mimbar/Podium	1	unit
35	Handy Cam	3	unit
36	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	unit

No	Uraian Sarpras	Jumlah	Satuan
37	Alat Pemadam Portable	5	unit
38	Mainframe	1	unit
39	P.C Unit	18	unit
40	Lap Top	23	unit
41	Note Book	12	unit
42	Personal Komputer Lain-lain	2	unit
43	Hard Disk	1	unit
44	Printer	16	unit
45	Monitor	4	unit
46	Printer	21	unit
47	Scanner	1	unit
48	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	2	unit
49	Server	1	unit
50	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	unit
51	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	unit
52	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	unit
53	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	8	unit
54	Meja Rapat Pejabat Eselon III	1	unit
55	Meja Maket/Peta	2	unit
56	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	unit
57	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	unit
58	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	15	unit
59	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	8	unit
60	Kursi Rapat Pejabat Eselon III	16	unit
61	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	unit
62	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	2	unit
63	Lemari Buku untuk Perpustakaan	2	unit
64	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	4	unit
<b>Alat Studio dan Alat Komunikasi</b>			unit
1	Camera + Attachment	4	unit
2	Microphone Floor Stand	6	unit
3	Digital Audio Tape Recorder	1	unit
4	Peralatan studio Visual Lain-lain	1	unit

No	Uraian Sarpras	Jumlah	Satuan
5	Camera Electronic	2	unit
6	Sound System	1	unit
7	Telephone (PABX)	1	unit
8	Pesawat Telephone	1	unit
9	Facsimile	1	unit
10	Alat Komunikasi Lain-lain	2	unit
<b>Alat Laboratorium</b>		4	unit
1	Personal Komputer	3	unit
2	Alat Ukur	1	unit
	Jumlah	395	
<b>Bangunan Gedung</b>			
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1,490.40	m <sup>2</sup>
2	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	98.00	m <sup>2</sup>
3	Gedung Garasi/Pool Permanen	88.00	m <sup>2</sup>
4	Gedung Garasi/Pool Permanen	30.00	m <sup>2</sup>
5	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	300.00	m <sup>2</sup>
6	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	500.00	m <sup>2</sup>
<b>Monumen</b>			
1	Tugu Peringatan Lainnya		

\*Sumber data BMD 2021 yang diolah

### 2.3 Kinerja Pelayanan BP3D

Gambaran kinerja BP3D 5 (lima) tahun sebelumnya diperoleh dari dokumen Evaluasi RPJMD dan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3  
Pencapaian Kinerja Pelayanan BP3D  
Kabupaten Boyolali

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Targ et NSP K	Targ et IKK	Targ et Indikator Lain nya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	<b>Dokumen Perencanaan (RKPD, RPJMD, RENSTRA PD dan RENJA PD)</b>				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
	<b>Dokumen Evaluasi (RKPD dan RPJMD)</b>				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
1	Dokumen RKPD dan RPJMD				3	2	2	2	2	3	2	2	2	3	100	100	100	100	150
2	Dokumen Renja dan Renstra PD				3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	100	100	100	100	100
3	Tersusunnya DSP usulan kegiatan Kecamatan/Kelurahan				25	25	25	25	25	25	25	25	25	28	100	100	100	100	112
4	Dokumen Evaluasi				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
5	Terverivikasinya RKA SKPD				98	98	98	98	98	110	98	100	100	106	112	100	102	102	108
6	Tersusunnya dokumen KUA PPAS APBD				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Targ et NSP K	Targ et IKK	Targ et Indikator Lain nya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
7	Tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang				2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	100	100	150	100	100
	<b>Prosentase dokumen data/informasi dan kajian teknis pembangunan daerah yang dipublikasikan</b>				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	100	100
8	Dokumen data/informasi pembangunan daerah yang dipublikasikan				4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	100	100	100	100	100
9	Rumusan kebijakan/kajian teknis perencanaan pembangunan ekonomi				2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	150	100	100	100	100
10	Rumusan kebijakan/kajian teknis perencanaan pembangunan sosial budaya				3	7	5	4	4	3	7	5	4	4	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Targ et NSP K	Targ et IKK	Targ et Indikator Lain nya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
11	Kajian rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam				1	1	2	2	1	1	1	1	0	1	100	100	50	0	100
12	Tersusunnya studi data infrastruktur dan potensi rawan bencana				0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	100	100	100	100
13	Rumusan kebijakan/kajian teknis perencanaan pembangunan prasarana dan sumber daya alam (proposal)				15	15	15	15	15	16	15	15	15	16	106	100	100	100	106
14	Rumusan kebijakan teknis perencanaan pengembangan permukiman perdesaan				1	5	5	5	5	1	5	0	7	5	100	100	0	140	100
15	Rumusan kebijakan teknis perencanaan pengembangan air				1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	100	100	100	200	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Targ et NSP K	Targ et IKK	Targ et Indikator Lain nya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	minum/air bersih dan sanitasi																		
16	Kerjasama pembangunan daerah yang diimplementasikan				2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	100	100	100	100	100
17	Cakupan peningkatan kemampuan teknis aparatur perencana				100	50	50	75	75	100	50	100	75	75	100	100	200	100	100
	<b>Cakupan hasil penelitian dan inovasi daerah yang diimplementasikan(%)</b>				<b>50</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>75</b>	<b>85</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>66.7</b>	<b>88.9</b>	<b>87.1</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>111</b>	<b>119</b>	<b>102</b>
18	Inovasi hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat				4	4	5	6	7	4	4	5	6	7	100	100	100	100	100
	Terbangunnya TechnoPark																		
	<b>Dokumen statistik daerah yang</b>				<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Targ et NSP K	Targ et IKK	Targ et Indikator Lain nya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	<b>dipublikasikan</b>																		
19	Dokumen statistik daerah yang dipublikasikan				7	1	1	1	1	7	1	1	1	1	100	100	100	100	100

Sumber : data LKjIP dan Evaluasi RPJMD yang diolah.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua indikator yang menjadi tugas BP3D Kabupaten Boyolali dari tahun 2016 sampai dengan 2020 semua telah mencapai target yang ditetapkan, hal ini didukung oleh faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan antara lain sumber daya manusia yang kompeten, dukungan sarana prasarana yang cukup serta adanya koordinasi, asistensi dan pendampingan yang efektif diantara PD dengan BP3D.

Pagu anggaran dan realisasi anggaran belanja langsung beserta pertumbuhan anggaran dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	1 (2 0 1 6) 7)	1 (2 0 1 7) 8)	2 (2 0 1 8) 9)	3 (2 0 1 9) 0)	4 (2 0 1 0) 0)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	17	18
Perencanaan																	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1,737,727,000	1,678,395,000	977,091,000	726,013,000	328,287,000	1,609,818,350	1,455,576,465	850,882,277	671,790,121	209,215,743	92.64	86.72	87.8	92.53	63.73	0.3956	0.5040
Penyusunan rancangan RPJMD	258,184,000	-	-	-	115,977,000	246,622,250	-	-	-	99,121,000	95.52	0.00	0.00	0.00	85.47	0.1736	0.2000
Penyusunan Rancangan Dokumen RKPd	243,840,000	609,625,000	386,121,500	210,000,000	14,310,000	237,062,800	481,337,025	363,520,275	192,575,343	14,310,000	97.22	78.96	94.15	91.70	10.00	0.7632	0.77533
Penyusunan Renja dan Renstra PD	25,000,000	2,325,000	1,260,000	-	-	21,910,500	2,325,000	1,248,000	-	-	87.64	10.00	99.05	0.00	0.00	1.7072	1.5990
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	261,232,000	251,860,000	158,796,500	205,013,000	140,000,000	237,045,900	220,884,640	117,034,352	172,772,378	76,890,000	90.74	87.70	73.70	84.27	54.92	0.1329	0.2525

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Pembahasan KUA dan PPAS	95,730,00	102,515,00	125,807,00	45,000,00	58,000,00	81,345,00	76,334,15	89,034,950	44,482,900	18,894,743	84.7	74.4	70.6	98.5	32.8	0.14	0.334	0.91
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	28,910,00	27,110,00	-	-	-	26,035,00	21,120,20	-	-	-	90.6	77.1	0.00	0.00	0.00	0.032	0.117	0.03
Koordinasi Penyusunan Kebijakan Rencana Tata Ruang	-	53,745,00	305,106,00	266,000,000	-	-	52,474,250	280,044,700	261,959,500	-	0.00	97.4	91.9	98.8	0.00	-0.13	-0.412	-0.49
Koordinasi Perencanaan Tata Ruang	-	203,040,000	-	-	-	-	177,812,450	-	-	-	0.00	87.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Koordinasi Penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang	-	428,175,000	-	-	-	-	423,288,750	-	-	-	0.00	98.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyusunan kebijakan ttg penyusunan rencana tata ruang	57,140,00					54,840,00					95.97	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	126,790,000					124,202,000					97.96	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	176,760,000					159,181,400					90.06	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Revisi rencana tata ruang	175,750,000					171,435,000					97.54	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	100,170,000					97,280,000					97.11	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Fasilitasi Penyusunan Renstra SKPD	188,221,000					152,858,500					81.21	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Program Pengembangan data / informasi</b>	<b>204,878,000</b>	<b>218,811,000</b>	<b>172,605,000</b>	<b>348,700,000</b>	<b>149,040,000</b>	<b>190,971,700</b>	<b>192,084,087</b>	<b>146,699,551</b>	<b>295,597,782</b>	<b>121,647,900</b>	93.21	87.79	84.99	84.77	81.62	0.0657	0.0944
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuan penyusunan dokumen perencanaan	54,840,000	56,811,000	65,000,000	212,000,000	-	53,645,000	55,703,250	62,693,500	200,978,600		97.82	98.05	96.45	94.80	0.00	-0.288	-0.2812
Penyusunan Profil Daerah	75,000,000	72,000,000	56,170,000	67,500,000	108,540,000	67,858,450	58,666,175	45,932,530	40,385,257	108,377,500	90.48	81.48	81.77	59.83	99.85	-0.0713	-0.0894
Pengelolaan SIPD Online	47,370,000	60,000,000	32,350,000	39,000,000	27,000,000	46,602,500	54,380,737	30,392,521	30,900,000	-	98.38	90.63	93.5	79.23	0.00	0.1190	0.0857

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Pengelolaan dan Pengembangan Web	27,668,00	30,000,00	19,085,00	30,200,00	13,500,00	22,865,750	23,333,925	7,681,000	23,333,925	13,270,400	82.64	77.8	40.5	77.6	98.0	0.13	0.54	0.11
<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>318,435,000</b>	<b>450,884,000</b>	<b>331,584,000</b>	<b>293,433,000</b>	<b>92,534,500</b>	<b>295,931,652</b>	<b>431,631,065</b>	<b>309,715,902</b>	<b>283,930,720</b>	<b>92,534,500</b>	<b>92.3</b>	<b>95.3</b>	<b>93.0</b>	<b>96.6</b>	<b>10.00</b>	<b>0.24</b>	<b>0.26</b>	<b>0.18</b>
Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah	155,000,000	109,275,000	110,000,000	100,000,000	79,667,500	151,400,000	105,835,000	107,139,500	98,494,000	79,667,500	97.68	96.5	97.40	98.9	10.00	0.14	0.42	0.13
Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	-	247,534,000	119,134,000	109,134,000	12,867,000	-	236,903,804	111,412,500	101,756,200	12,867,000	0.00	95.1	93.2	93.4	10.00	1.03	1.07	1.14
Koordinasi perencanaan pembangunan	140,000,000	94,075,000	102,450,000	84,299,000	-	126,519,402	88,892,261	91,163,902	83,680,520	-	90.37	94.9	88.8	99.7	0.00	0.12	0.35	0.10

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
bidang ekonomi																	
Pendampingan program penanganan kemiskinan daerah	23,435,000					18,012,250					76.86	0.00	0.00	0.00	1.00	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya</b>	<b>463,365,000</b>	<b>497,280,000</b>	<b>343,475,000</b>	<b>350,959,000</b>	-	<b>421,089,705</b>	<b>463,431,582</b>	<b>331,517,935</b>	<b>340,341,450</b>	-	90.88	93.19	96.2	96.7	0.00	0.0571	0.0435
Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan	60,000,000	60,000,000	58,500,000	60,000,000		52,870,250	52,975,000	56,202,500	54,188,000	-	88.12	88.29	96.07	90.31	0.00	0.0000	-0.0061
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	302,540,000	437,280,000	284,975,000	290,959,000		287,101,665	410,456,582	275,315,435	286,153,450	-	94.90	93.87	96.61	98.35	0.00	0.008	0.0008

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender & anak	48,300,00					39,477,750											
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	52,525,00					41,640,040											
<b>Program Perencanaan Pembangunan Prasarana</b>	<b>365,292,000</b>	<b>126,900,000</b>	<b>50,000,000</b>	-	<b>100,000,000</b>	<b>354,880,875</b>	<b>124,730,000</b>	<b>49,720,000</b>	-	<b>99,726,000</b>	97.15	98.29	99.44	0.00	99.73	0.2958	0.2890

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wilayah dan Sumber Daya Alam																	
Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (KLHS)	56,452,00	126,900,000	50,000,000	-	100,000,000	55,688,000	124,730,000	49,720,000	-	99,726,000	98.65	98.29	99.44	0.00	99.73	-0.1081	-0.1100
Penyusunan Masterplan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	56,840,00					54,420,000					95.74	0.00	0.00	1.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Pemberdayaan petani pemakai air	42,000,00					36,245,860.00					86.30	0.00	0.00	2.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelaksanaan WISMP-2 Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air	210,000,000					208,527,015					99.30	##.##	##.##	3.00	##.##	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana</b>	<b>115,000,000</b>	-	<b>55,000,000</b>	<b>50,625,000</b>	<b>69,905,000</b>	<b>107,255,904</b>	-	<b>54,521,000</b>	<b>49,902,000</b>	<b>69,905,000</b>	0.00	0.00	99.13	98.57	10.00	0.1047	0.0894
Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana	-	-	55,000,000	50,625,000	69,905,000	-	-	54,521,000	49,902,000	69,905,000	0.00	0.00	99.13	98.57	10.00	-1.0000	-1.0000
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	115,000,000					107,255,904					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>	351,190,000	62,650,000	92,150,000	90,000,000	-	326,167,235	60,779,590	91,279,103	89,825,986	-	92.7	97.1	99.5	99.1	0.00	0.3130	0.2942
Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	237,350,000	62,650,000	92,150,000	90,000,000		214,414,235	60,779,590	91,279,103	89,825,986	-	90.4	97.1	99.5	99.1	0.00	0.2743	0.2430
Perencanaan pengembangan infrastruktur	113,840,000					111,753,000					98.7	0.00	0.00	0.00	1.00	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintah</b>	40,200,000	70,000,000	34,546,000	45,000,000	-	29,632,950	49,055,528	29,889,250	34,564,768		0.00	70.8	86.2	76.1	0.00	0.1587	-0.0701

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
han																	
Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan	-	35,000,000	17,700,000	30,000,000		-	27,864,391	16,355,500	27,456,768	-	0.00	79.61	92.40	91.52	0.00	0.0527	0.0049
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Renaksi PPK dan aksi HAM	-	35,000,000	16,846,000	15,000,000		-	21,191,137	13,533,750	7,108,000	-	0.00	60.55	80.34	47.39	0.00	0.3264	0.4392
Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan	40,200,000					29,632,950					1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar</b>	<b>158,800,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>54,995,000</b>	<b>175,000,000</b>	-	<b>135,451,620</b>	<b>93,791,550</b>	<b>52,863,450</b>	<b>167,498,555</b>	-	85.30	93.79	96.12	95.71	0.00	-0.0192	-0.0517

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Koordinasi perencanaan air minum drainase dan sanitasi perkotaan	158,800,000	100,000,000	54,995,000	175,000,000		135,451,620	93,791,550	52,863,450	167,498,555		85.30	93.79	96.2	95.1	0.00	-0.240	-0.0517
<b>Program Kerjasama Pembangunan Daerah</b>	<b>270,600,000</b>	<b>315,480,000</b>	<b>204,150,000</b>	<b>210,000,000</b>	-	<b>217,059,955</b>	<b>261,763,670</b>	<b>190,092,107</b>	<b>196,293,307</b>	-	80.21	82.97	93.1	93.7	0.00	0.0520	0.0255
Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga (FEDEP)	105,000,000	190,000,000	130,000,000	130,000,000		78,290,195	173,792,597	122,056,500	121,827,500	0	74.56	91.47	93.89	93.71	0.00	-0.520	-0.1047
Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	165,600,000	125,480,000	74,150,000	80,000,000		138,769,760	87,971,073	68,035,607	74,465,807	-	83.80	70.11	91.5	93.08	0.00	0.1995	0.1684

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembangan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	196,225,000	157,900,000	15,000,000	15,000,000	-	185,490,600	156,756,200	15,000,000	14,927,599	-	94.53	99.28	10.00	99.52	0.00	0.6724	0.8775
Peningkatan kemampuan teknis aparatur perencanaan	196,225,000	157,900,000	15,000,000	15,000,000		185,490,600	156,756,200	15,000,000	14,927,599	-	94.53	99.28	10.00	99.52	0.00	0.9018	0.8775
<b>Fungsi lainnya</b>																	
<b>Administrasi Umum pada semua Perangkat Daerah</b>																	
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	912,870,000	1,340,369,000	1,174,665,000	1,380,125,000	967,967,278	850,156,1,412	1,255,311,4245	1,118,374,245	1,336,009,694	896,358,784	93.13	93.65	95.21	96.80	92.60	-0.0117	-0.0105
Penyediaaa											71	46	75	6.	10	0.0	0.

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
penyediaan jasa surat menyurat	1,400,000	2,500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,004,160	1,166,702	750,000	64,000	1,000,000	.73	.67	.00	40	0.00	696	0008
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	123,600,000	130,200,000	195,580,000	193,000,000	96,000,000	102,317,238	101,604,095	176,242,853	172,459,914	62,554,755	82.78	78.04	90.11	89.36	65.16	0.0518	0.1034
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	109,500,000	230,500,000	121,900,000	126,000,000	43,924,000	106,210,250	226,090,174	118,958,376	124,297,895	40,661,000	97.00	98.09	97.59	98.65	92.57	0.2004	0.2117
Penyediaan jasa administrasi keuangan	3,050,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	2,550,000	2,440,000	2,750,000	3,320,000	3,424,000	1,012,800	80.00	78.57	94.86	97.83	39.72	0.0365	0.1923
Penyediaan jasa kebersihan kantor	38,355,000	14,000,000	15,000,000	15,000,000	17,467,000	36,155,000	14,000,000	14,446,000	14,972,000	16,844,700	94.26	10.00	96.31	99.14	96.44	0.1704	0.1650
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	53,000,000	57,000,000	45,000,000	55,000,000	34,845,000	52,745,000	56,908,000	44,947,000	54,540,000	34,825,000	99.52	99.84	99.88	99.16	99.44	0.0875	0.0866
Penyediaan											99	99	95	99	99	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Alat tulis kantor	30,000,00	35,000,00	20,000,00	15,000,00	49,497,00	29,962,00	34,933,50	19,176,00	14,990,00	49,391,82	.87	.81	.88	.93	.79	0.95	0.09	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22,500,00	20,000,00	13,100,00	14,618,00	64,888,00	22,500,00	19,904,75	12,225,250	14,590,00	64,435,47	100.00	99.52	93.22	99.81	99.30	-0.190	-0.189	
Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	41,900,00	14,890,00	15,000,00	15,000,00	3,750,00	41,370,00	14,705,00	14,845,00	14,984,00	3,745,400	98.74	98.66	98.77	99.89	99.88	0.620	0.6167	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	222,370,000	323,500,000	101,530,000	242,000,000		214,895,000	291,296,500	94,134,000	240,440,500		-	96.64	90.05	92.72	99.36	0.00	0.020	-0.0277
Penyediaan peralatan rumah tangga	5,000,000	5,000,000	4,500,000	5,000,000	1,000,000	5,000,000	5,000,000	4,500,000	5,000,000	1,000,000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.379	0.3797	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	4,140,000	4,800,000	4,020,000	5,000,000	675,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,900,000	675,000	86.96	75.00	89.55	78.00	100.00	0.437	0.43977	

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
perundangan																		
Penyediaan bahan logistik kantor	35,000,000	38,185,000	118,800,000	103,800,000	48,500,000	21,555,563	38,128,794	115,430,298	103,108,174	21,864,341	61.59	99.85	97.6	99.33	45.8	-0.0	-0.63	-0.28
Penyediaan makanan dan minuman	59,800,000	46,500,000	36,875,000	40,800,000	124,867,000	49,615,750	46,360,000	28,650,000	33,150,000	123,425,000	82.97	99.70	77.9	81.5	98.5	-0.1	-0.36	-0.16
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	116,300,000	210,716,000	196,000,000	161,000,000	113,148,000	113,986,317	209,731,897	192,361,123	159,244,091	110,473,493	98.01	99.3	98.4	98.1	97.4	0.05	0.05	0.63
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (PTT)	46,955,000	204,078,000	282,860,000	384,407,000	365,856,000	46,800,000	189,132,000	274,788,345	376,845,120	364,450,000	99.67	92.8	97.5	98.3	99.2	-0.3	-0.36	-0.33
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>74,560,000</b>	<b>215,000,000</b>	<b>49,600,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>78,000,000</b>	<b>71,932,050</b>	<b>205,714,500</b>	<b>49,437,500</b>	<b>49,962,000</b>	<b>76,901,888</b>	<b>96.48</b>	<b>95.8</b>	<b>99.7</b>	<b>99.2</b>	<b>98.9</b>	<b>-0.09</b>	<b>-0.09</b>	<b>-0.01</b>

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penataan Lingkungan Kantor	-	145,000,000	-			-	141,197,000	-			0.00	97.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	37,500,000	70,000,000	49,600,000	50,000,000	78,000,000	35,867,050	64,517,500	49,437,500	49,962,000	76,901,888	95.65	92.17	99.67	99.92	98.59	-0.1363	-0.1415
Pembangunan gedung kantor	37,060,000					36,065,000					97.32	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>15,880,000</b>	<b>8,610,000</b>	<b>8,200,000</b>	<b>6,500,000</b>	-	<b>14,939,000</b>	<b>8,015,000</b>	<b>8,103,000</b>	<b>6,500,000</b>	-	94.07	93.09	98.82	10.00	0.00	0.1956	0.1811
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	15,880,000	8,610,000	8,200,000	6,500,000		14,939,000	8,015,000	8,103,000	6,500,000	-	94.07	93.09	98.82	10.00	0.00	0.2502	0.22313

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
kinerja SKPD																		
<b>Program Pengembangan Data/Informasi/Stastistik Daerah</b>	<b>278,118,000</b>	<b>35,000,000</b>	<b>36,515,000</b>	<b>95,750,000</b>	<b>63,555,000</b>	<b>258,555,400</b>	<b>16,720,400</b>	<b>25,043,500</b>	<b>61,619,800</b>	<b>7,750,000</b>	92.97	47.7	68.5	64.3	12.1	0.3	1.01	0.67
Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	-	35,000,000	36,515,000	95,750,000	63,555,000	-	16,720,400	25,043,500	61,619,800	7,750,000	0.00	47.7	68.5	64.3	12.1	-0.1	0.21	0.20
Pengolahan updating dan analisis data dan statistik daerah	76,002,000	-	-	-	-	74,921,700		-			98.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penyusunan dan pengumpulan data PDRB	45,000,000	-	-	-	-	42,780,500		-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pengolahan updating dan	35,130,000	-	-	-	-	34,554,200		-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
analisis data PDRB																	
Penyusunan dan analisis data/informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi (NTP)	54,500,00	-	-	-	-	44,623,500		-			81.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah (IE)	36,370,00	-	-	-	-	34,979,500		-			96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pengumpulan,updatting,&analisis data informasi capaian target kinerja program & kegiatan	31,116,00					26,696,00					85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penelitian dan Pengembangan																	
Program Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah	76,660,00	232,130,000	451,842,000	491,032,000	284,687,500	69,497,500	186,464,861	441,310,040	483,613,400	281,726,000	90.6	80.3	97.6	98.4	98.9	-0.2	-0.24
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Penjaringan Krenova Kabupaten Boyolali	76,660,00	160,130,000	185,966,000	153,940,000	124,835,000	69,497,500	154,635,800	181,826,250	153,850,500	122,435,000	90.6	96.5	97.7	99.9	98.0	-0.0	-0.10
Koordinasi bidang penelitian dan pengembangan	-	27,000,00	54,468,00	65,225,00		-	26,833,06	52,100,290	63,114,400	-	0.00	99.3	95.8	96.5	96.6	-0.2	-0.24
Pameran inovasi	-		-			-		-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kajian penelitian dan pengembangan	-	45,000,00	72,000,00	131,625,000		-	4,996,000	71,638,500	129,500,000	-	0.00	11.1	99.0	98.5	98.3	-0.3	-0.66

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	1 (2016)	1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penguatan Sistem Inovasi Daerah	-		139,408,00	82,823,00	121,082,500	-		135,745,000	80,021,00	121,082,500	0.00	0.00	97.37	96.22	100.00	0.0481	0.0388
Fasilitasi Penerapan hasil penelitian dan pengembangan	-		-	57,419,00	38,770,00	-		-	57,127,500	38,208,500	0.00	0.00	0.00	99.49	98.55	0.2170	0.2228
<b>JUMLAH</b>	<b>5,579,80 0,000.00</b>	<b>5,509,40 9,000.00</b>	<b>4,051,41 8,000.00</b>	<b>4,328,13 7,000.00</b>	<b>2,133,97 6,000.00</b>	<b>5,138,83 0,774.00</b>	<b>4,961,82 5,910.00</b>	<b>3,764,44 8,860.00</b>	<b>4,082,37 7,182.00</b>	<b>1,855,76 5,815.00</b>	92.10	90.06	92.2	94.2	86.6		

\* Sumber : data LKjIP dan Evaluasi RPJMD yang diolah.

Dari tabel 2.4 menunjukkan realisasi penyerapan anggaran BP3D Kabupaten Boyolali periode 2016 sampai dengan 2020 rata-rata sebesar 91,46%. Capaian terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 87,80%, sedangkan tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 94,40%.

Walaupun trend mengalami naik dan turun, tetapi dari pencapaian kinerja tercapai semua sasaran tercapai, hanya saja lebih efisien dari sisi penganggarannya. Sabagai contoh tahun anggaran 2020 dimana saat itu dilakukan efisiensi anggaran untuk *refocusing* penanggulangan pandemi Covid-19

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.**

Dinamika lingkungan internal dan eksternal baik tantangan maupun peluang yang akan dihadapi BP3D, perlu menjadi perhatian agar peningkatkan kinerja pelayanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat tercapai. Hal ini diperlukan guna mempertajam kebijakan pelayanan untuk mendukung pencapaian target dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

### **a. Tantangan**

Keberhasilan pencapaian tujuan perencanaan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia perencana yang handal, visioner dan profesional. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Boyolali yang baik dan tepat sasaran, guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dibutuhkan sumber daya manusia perencana yang kompeten untuk mendukung kinerja perencanaan pembangunan. Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dan lemahnya fungsi penelitian dan inovasi sebagai basis perumusan kebijakan. Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas. Hal ini harus mampu dikelola dan dimanfaatkan secara tepat, guna mendukung proses perencanaan pembangunan daerah yang terbuka dan transparan, serta membuka akses

informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kabupaten Boyolali.

Pencapaian BP3D Kabupaten Boyolali berdasarkan penilaian Lembar Hasil Evaluasi - Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah (LHE-LKjIP) tahun 2020 oleh Inspektorat Kabupaten Boyolali diperoleh nilai 82,93 dengan kategori A (memuaskan) dengan rincian hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja 30% (27,20), Pengukuran Kinerja 25% (20,31), Pelaporan Kinerja 15% (13,11), Evaluasi Internal 10% (6,70), dan Capaian Kinerja 20% (15,72) setidaknya kedepannya dapat lebih ditingkatkan lagi dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

### **b. Peluang**

Salah satu faktor yang menjadi perhatian penyelenggaraan pemerintahan adalah dewasa ini adalah pengaruh globalisasi. Globalisasi merupakan faktor eksternal dari dunia internasional yang semakin lama semakin berpengaruh dalam proses pembangunan di Indonesia termasuk di dalamnya Kabupaten Boyolali. Pengaruh globalisasi ini dapat dilihat dari cara pandang tentang demokrasi, perdagangan dan perkembangan teknologi (IT). Ada sisi positif dan sisi negatif dari pengaruh globalisasi terhadap perencanaan pembangunan daerah. Dilihat dari sisi positifnya, globalisasi dapat menjadi peluang yang baik untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, serta daya saing daerah dalam menghadapi tantangan internasional. Perencanaan pembangunan daerah harus melihat globalisasi sebagai satu peluang baik untuk memajukan pembangunan daerah. Menjawab peluang tersebut dibutuhkan kompetensi perencana pembangunan daerah yang sensitif terhadap perkembangan global yang dapat memberikan pengaruh positif pada pembangunan daerah ke depan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana juga semakin terbuka, baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Didukung pula oleh implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), terbuka peluang pengembangan kompetensi aparatur untuk menciptakan aparatur berkualitas.

Untuk mewujudkan harapan di atas, dengan mencermati tantangan dan peluang untuk mengembangkan pelayanan BP3D kedepan, maka beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut :

1. Menciptakan akselerasi dalam beradaptasi guna mengantisipasi sering terjadinya perubahan/ pedoman perencanaan pembangunan.
2. Meningkatkan koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, guna menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan bijaksana pemberlakuan peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan negara.
3. Meningkatkan kualitas SDM perencana dan peneliti terhadap penguasaan keahlian (*skill*) fungsional perencanaan dan fungsional peneliti sesuai tugas pokok dan fungsi BP3D Kabupaten Boyolali.
4. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan antar PD guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan sinergis.
5. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.
6. Meningkatkan kualitas kebijakan fiskal dalam menyikapi celah fiskal yang ada sehingga secara optimal dapat memanfaatkan kapasitas fiskal untuk mencapai tujuan pembangunan, terlebih masih berjalannya masa pemulihan ekonomi efek dari adanya pandemi Covid-19.
7. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme dan kredibilitas perencanaan.
8. Mempersiapkan segala bentuk dinamika perubahan, termasuk pengimplementasian Surat Edaran Menpan RB Nomor 392 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan

Konkret Penyederhanaan Birokrasi, dimana ke depannya Jabatan Struktural Eselon IV akan alih status menjadi Jabatan Fungsional.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. BP3D Kabupaten Boyolali sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan penunjang pemerintahan perencanaan dan penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemetaan permasalahan pelayanan BP3D Kabupaten Boyolali dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan BP3D Kabupaten Boyolali

<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
Belum optimalnya implementasi perencanaan sektoral dan berbasis isu strategis	Belum terbangunnya sistem manajemen kinerja	Pembagian dan sinergi target kinerja antara kepala daerah dengan perangkat daerah belum terbangun
		Indikator kinerja masih banyak berorientasi level output belum <i>outcome/impact</i>
		Penetapan target kinerja dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran
	Belum optimalnya kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja	Belum terbangunnya sistem pengelolaan data kinerja yang baik

<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
		Belum terbangunnya sinergi antara <i>e-planning</i> dengan <i>e-kinerja</i>
		Pengendalian dan evaluasi belum mengawal capaian kinerja <i>outcome</i>
	Belum optimalnya implementasi perencanaan sektoral dan berbasis isu strategis	Belum terbangunan instrumen pengendalian implementasi, misalnya perencanaan berupa Rencana Aksi Daerah (RAD) Perlunya kejelasan tugas dan fungsi antar bidang dalam BP3D dalam mengawal perencanaan sektoral
Lemahnya fungsi penelitian dan inovasi sebagai basis perumusan kebijakan	Minimnya ketersediaan hasil penelitian untuk basis perumusan kebijakan	Kegiatan penelitian belum bisa dilaksanakan karena tidak adanya SDM fungsional peneliti Tidak adanya hasil penelitian yang terstruktur karena penelitian masih terlaksana secara terfragmentasi di tingkat OPD

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Koordinasi masih lemah karena Litbang belum dikenal di kalangan OPD dan masyarakat
		Belum terlaksananya proses tindaklanjut dari lomba Kreasi dan Inovasi (KRENOVA)
	Belum optimalnya inovasi daerah	Belum adanya fasilitasi pendaftaran HAKI
		Lemahnya fasilitasi pengembangan dari inovasi oleh masyarakat

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati 2021 – 2026**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 menetapkan visi yang merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu :

**" BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas ".**

Rumusan visi tersebut memiliki muatan kondisi dan prasyarat yang akan dicapai dalam pembangunan, dengan penjabaran sebagai berikut :

**Tabel 3.2.1 Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Boyolali 2021-2026**

<b>Visi</b>	<b>Kata Kunci</b>	<b>Penjelasan</b>
“BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI” Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)	Boyolali Maju	Maju dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang semakin sejahtera dan daerah yang semakin berdaya saing yang ditopang dengan pembangunan infrastruktur wilayah berkualitas dan merata, serta tata kelola pemerintahan yang semakin bersih, efektif, dan dipercaya masyarakat
	Meneruskan Pro Investasi	Pro investasi telah menjadi arah pembangunan dan identitas Kabupaten Boyolali dengan berbagai capaian pembangunan yang telah membawa manfaat bagi masyarakat.
		Melanjutkan arah pembangunan yang pro investasi berarti tidak hanya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus membangun sinergi dengan arah pembangunan nasional, terutama dalam rangka pemulihan ekonomi nasional secara sistematis dan cepat
		Arah pro investasi membutuhkan sinergi lintas sektor dan pemangku kepentingan, yang muaranya tetap pada kesejahteraan masyarakat Boyolali, tanpa menghadirkan ketimpangan sosial

Visi	Kata Kunci	Penjelasan
		Pro investasi tetap dikendalikan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, yakni selain berorientasi ekonomi dan sosial, tidak kalah penting pada keberlanjutan lingkungan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta membawa manfaat pembangunan bagi generasi masa depan
	Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)	<p>Pembangunan yang efektif membutuhkan prasyarat berupa sinergi dan kolaborasi seluruh komponen governance, yakni masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta</p> <p>Seluruh komponen daerah diharapkan mampu melangkah dan menata bersama penuh totalitas yang merupakan implementasi dari prinsip gotong royong</p>
		<p>Gotong royong dengan menjalankan perannya masing-masing namun saling bersinergi dan berkolaborasi dalam ikatan visi pembangunan daerah maupun landasan nilai kearifan yang tertanam kuat di tengah masyarakat berupa filosofi dari Pangeran Sambernyawa “Tiji Tibeh (mati siji, mati kabeh, mukti siji mukti kabeh)”</p>

Sebagai upaya untuk mencapai Visi tersebut, telah ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Boyolali, yaitu:

- 1. Boyolali meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan**
- 2. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya**
- 3. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional**
- 4. Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya**
  - a. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai** untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
  - b. Pembangunan integritas** dengan menumbuhkan karakter yang baik bagi individu maupun organisasi dalam mewujudkan tindakan maupun keputusan bagi kebaikan bersama.
  - c. Pemerintahan yang baik dan bersih** berdasarkan prinsip-prinsip pokok good and clean governance. Peran masyarakat yang melahirkan kontrol terhadap jalannya pengelolaan lembaga pemerintahan sangat diharapkan. Kontrol masyarakat akan berdampak pada tata pemerintahan yang baik, efektif, dan bebas dari KKN.
  - d. Tidak berhenti pada good and clean governance, Boyolali berusaha menumbuhkan Smart governance**, atau pemerintah yang dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi, dengan terus **melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adaptasi teknologi yang terpadu, yang bermuara pada efektifitas, efisiensi dan kesejahteraan masyarakat.**
- 5. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing**

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah. Dalam melaksanakan tugas Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati, terkait tugas pokok dan fungsi BP3D Kabupaten Boyolali untuk mendukung :

**Misi ke-4 (empat), yaitu Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.**

BP3D sebagai institusi perencana, penelitian dan pengembangan berfungsi membantu mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di daerah dan bertanggung jawab atas hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan sebagai wujud manifestasi dan pelaksanaan manajemen pembangunan. Institusi perencana, penelitian dan pengembangan harus mampu mengoordinasikan proses perencanaan, penelitian dan pengembangan secara intensif dan menyeluruh serta senantiasa melakukan kajian dan analisis dalam rangka mengevaluasi hasil perencanaan yang telah dirumuskan.

Dengan berpedoman pada RPJMD maka BP3D Kabupaten Boyolali sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam

menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama. Dalam pelaksanaan program terdapat faktor penghambat dan pendorong, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini.

**Tabel : 3.2.2**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong**  
**Pelayanan PD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi: " <b>BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas</b> "				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi 4. Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya			
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Belum optimalnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum terbangunnya sistem pengelolaan data kinerja yang baik</li> <li>- Belum terbangunnya sinergi antara <i>e-planning</i> dengan <i>e-kinerja</i></li> <li>- Pengendalian dan evaluasi belum mengawal capaian kinerja <i>outcome</i></li> <li>- Belum terbangun instrument pengendalian implementasi, misalnya berupa Rencana Aksi Daerah (RAD)</li> <li>- Perlunya kejelasan tugas dan fungsi antar bidang dalam mengawal perencanaan sektoral</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana dan prasarana yang cukup memadai</li> <li>- Implementasi SIPD</li> </ul>

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2	Program Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Belum sinkronnya antar dokumen perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembagian dan sinergi target kinerja antara Kepala Daerah dengan Perangkat Daerah belum terbangun</li> <li>- Indikator kinerja masih banyak berorientasi level <i>output</i> belum <i>outcome/impact</i></li> <li>- Penetapan target kinerja dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019</li> <li>- Implementasi Kepmendagri 050 tahun 2020</li> </ul>
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Belum optimalnya fungsi penelitian dan inovasi sebagai basis perumusan kebijakan .	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan penelitian belum bisa dilaksanakan karena tidak adanya SDM fungsional peneliti</li> <li>- Tidak adanya hasil penelitian yang terstruktur karena penelitian masih terlaksana secara terfragmentasi di tingkat PD</li> <li>- Koordinasi masih lemah karena Litbang belum dikenal di kalangan PD dan masyarakat</li> <li>- Belum terlaksananya proses tindak lanjut dari lomba Kreasi dan Inovasi (Krenova)</li> <li>- Belum adanya fasilitasi pendaftaran HAKI</li> <li>- Lemahnya fasilitasi pengembangan dan inovasi oleh masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya Roadmap SIDa 2018-2023</li> <li>- Tersusunnya Rinduk kelitbangan</li> </ul>

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

Telaahan terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024, Renstra Kementerian Dalam Negeri ( Ditjen Bina Bangda) Tahun 2020-2024, dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk membangun keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra BP3D Kabupaten Boyolali, dengan Renstra Kementerian dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing. Telaah ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan BP3D Kabupaten Boyolali telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri ( Ditjen Bina Bangda) dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Apakah tingkat capaian kinerja BP3D Kabupaten Boyolali melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri ( Ditjen Bina Bangda) dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

#### **1. Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas**

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Kementerian PPN/Bappenas menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan dokumen yang bersifat indikatif. Dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, maka Kementerian PPN/Bappenas menyusun Renstra Tahun 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas dalam mengawal tercapainya perencanaan dan pembangunan nasional.

Adapun Renstra Kementerian Bappenas memuat Visi dan Misi sebagai berikut

Visi: "Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Misi :

1. Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.
2. Menguatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka pencapaian tujuan Kementerian PPN/Bappenas selama Tahun 2020-2024, dijabarkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.

Sasaran Strategis:

- a. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.

Indikator Sasaran: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.

- b. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.

Indikator Sasaran: Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional.

2. Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sasaran Strategis:

- a. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner

Indikator Sasaran:

- 1) Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L.

- 2) Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L.

3. Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Sasaran Strategis:

a. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Indikator Sasaran:

- 1) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas.
- 2) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 3) Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional.

## **2. Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu unsur perangkat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri. Penyelenggaraan urusan dalam negeri tersebut dipertegas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, adalah menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Selanjutnya, mempedomani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, serta sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri di bidang urusan pemerintahan dalam negeri tersebut di atas, Kementerian Dalam Negeri menyusun Rencana Strategis (Renstra)

Tahun 2020-2024 untuk menjadi pedoman dalam mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam lima tahun ke depan.

Sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam:

Visi: “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.”

Misi:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Tujuan:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).

Sasaran strategis:

- a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1).
- b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di

- Daerah (SS2).
- c. Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3).
  - d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4).
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
- Sasaran strategis:
- a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5).
  - b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6).
  - c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7). (Ditjen Bina Bangda)**
- Sasaran Strategis ini, meliputi:
- 1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - 2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - 3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
  - 4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
  - 5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
  - 6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - 7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
  - 8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
  - 9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
  - 10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

Indikator sasaran:

- 1) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
  - 2) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
  - d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8).
  - e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9).
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).
- Sasaran strategis:
- a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10).
  - b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11).
  - c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12).

### **3. Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Tengah**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

Perubahan tersebut harus disusun dala tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatka akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah, Bappeda secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan, menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan dan memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2018-2023 adalah “Mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencana pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas hal ini mengandung pengertian bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah perencanaan yang rasional, proporsional, transparan dan akuntabel melalui pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, kerjasama daerah serta percepatan pembangunan daerah melalui penyusunan kebijakan yang berbasis pada hasil rekomendasi penelitian dan pengembangan yang berkualitas sebagai dasar perencanaan yang berkualitas (*planning by research*).

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda dalam rangka pencapaian tujuan Bappeda selama Tahun 2018-2023, dijabarkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan

pengembangan daerah yang berkualitas.

Indikator: Persentase perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas.

Sasaran :

a. Meningkatnya keselarasan, konsistensi dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah.

Indikator : Persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah.

b. Implementasi hasil kelitbangan iptekin sesuai dengan program perencanaan pembangunan daerah.

Indikator : Persentase hasil kelitbangan iptekin yang sesuai dengan program perencanaan pembangunan daerah.

2. Meningkatnya tata kelola organisasi Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

Indikator: Nilai kepuasan masyarakat.

Sasaran :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

Indikator : Nilai kepuasan masyarakat.

b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

Indikator : Nilai SAKIP perangkat daerah.

**Tabel 3.3**

**Komparasi Capaian Sasaran Renstra BP3D Kabupaten Boyolali Terhadap Sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas Sasaran, Renstra Kemendagri (Ditjen Bina Bangda) dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah**

No	Sasaran pada Renstra Kementerian PPN/Bappenas	Sasaran pada Renstra Kemendagri (Ditjen Bina Bangda)	Sasaran pada Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah	Sasaran pada Renstra BP3D Kabupaten Boyolali
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya integrasi,	Meningkatnya tata kelola	1. Meningkatnya keselarasan,	1. Optimalisasi

No	Sasaran pada Renstra Kementerian PPN/Bappenas	Sasaran pada Renstra Kemendagri (Ditjen Bina Bangda)	Sasaran pada Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah	Sasaran pada Renstra BP3D Kabupaten Boyolali
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7)	konsistensi dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah; 2. Implementasi hasil kelitbangank iptek in sesuai dengan program perencanaan pembangunan daerah	pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, 2. Meningkatnya kinerja pembangunan daerah, 3. Meningkatnya sinkronisasi penelitian terhadap perencanaan pembangunan
	Indikator Sasaran : Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran : Nilai Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah	Indikator Sasaran : a. Persentase konsistensi, keselarasan dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah. b. Persentase hasil kelitbangank iptek in yang sesuai dengan program perencanaan pembangunan daerah	Indikator Sasaran: a. Nilai SAKIP b. Nilai LKPPD

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **a. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Penyusunan dokumen perencanaan berpedoman pada tujuan RTRW Kabupaten Boyolali 2011-2031, yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan terintegrasi di seluruh wilayah

kabupaten berbasis pertanian dan pengembangan aneka industri yang berwawasan lingkungan. Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan menjadi tantangan yang harus dihadapi untuk meminimalisir terjadinya krisis tata ruang. Penataan ruang yang baik perlu memperhatikan keterhubungan antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Tujuan tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan perencanaan ruang wilayah, yaitu:

1. Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan
2. Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi darat dan udara
3. Strategi pengendalian dan pelestarian kawasan lindung
4. Strategi pengendalian dan pengembangan kawasan pertanian
5. Strategi pengoptimalan produktivitas kawasan pertanian
6. Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri
7. Strategi pengembangan kawasan pariwisata
8. Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara
9. Strategi pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi

Telaah rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali berfungsi sebagai:

- a. Penyelaras kebijakan Penataan Ruang Nasional, Propinsi dan Kabupaten;

b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan Pemanfaatan Ruang Kabupaten.

Perencanaan pembangunan daerah agar sesuai dengan RTRW Kabupaten Boyolali, maka BP3D Kabupaten Boyolali sesuai dengan tugasnya melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah, RTRW dimanfaatkan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
2. Pemanfaatan ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten;
3. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
4. Pemanfaatan dalam perumusan kebijakan dan strategi struktur ruang dan kawasan strategis.

**Tabel 3.4a**  
**Sinkronisasi RTRW Kabupaten Boyolali dengan RPJMD**  
**Kabupaten Boyolali dan Renstra PD**

<b>RTRW 2011 - 2031</b>	<b>RPJMD Kab Boyolali 2021-2026</b>	<b>Renstra SKPD</b>
Tujuan RTRW: “Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Yang Terintegrasi di Seluruh Wilayah Kabupaten Boyolali yang Berbasis Pertanian dan Pengembangan Aneka Industri”	<p>Misi 1: Boyolali meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan</p> <p>Misi 2: Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya.</p> <p>Misi 3: Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional</p> <p>Misi 4: Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang</p>	<p>Misi : 1 Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.</p>

	Bersih, Efektif dan Terpercaya Misi 5: Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing	
<b>Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah:</b>	<b>Tujuan dan Sasaran RPJMD</b>	<b>Tujuan dan Sasaran Renstra SKPD</b>
1. Pengembangan mutu dan jangkauan sarana dan prasarana penunjang kegiatan: (i) mengembangkan sarana prasarana sesuai skala pelayannnya; dan (ii) mengembangkan sistem informasi dan teknologi dalam meningkatkan kegiatan di perkotaan dan perdesaan.	<b>Tujuan 1:</b> Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik  <b>Sasaran 1:</b> Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	<b>Tujuan/Sasaran</b> Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.  Meningkatnya kinerja pembangunan daerah  Optimalisasi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah  Meningkatnya penelitian dan pengembangan dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah

### **b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS memuat kajian antara lain;

1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Berdasarkan hasil penilaian dan identifikasi isu strategis, tim kelompok kerja KLHS RPJMD Kabupaten Boyolali menentukan tingkat kepentingan dan prioritas masing-masing isu. Tabel berikut merupakan kesepakatan isu prioritas pembangunan berkelanjutan KLHS RPJMD Kabupaten Boyolali.

**Tabel 3.4b**  
**Daftar Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Boyolali**

No	Isu Prioritas PB
1	Kemiskinan dan kesenjangan
2	Perekonomian masyarakat
3	Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan
4	Penyediaan air bersih belum optimal
5	Infrastruktur wilayah belum optimal
6	Pelayanan publik belum maksimal
7	Kualitas permukiman dan sanitasi
8	Tingkat kesehatan masyarakat belum optimal
9	Penataan ruang dan alih fungsi lahan
10	Ketahanan pangan masyarakat
11	Pendapatan daerah belum optimal
12	Kerusakan dan pencemaran lingkungan
13	Kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan
14	Masih tingginya risiko bencana

Pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan kesepakatan global sebagai tindak lanjut dari *Milennium Development Goals*. *Sustainable Development Goals* (SDGs) bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial, menjaga kualitas lingkungan hidup, pembangunan yang inklusif, dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. *Sustainable Development Goals* (SDGs) memuat 17 tujuan pembangunan yang meliputi berbagai aspek pembangunan berkelanjutan, yang terdiri dari empat pilar yaitu 1) Pembangunan Sosial; 2) Pembangunan Ekonomi; 3) Pembangunan Lingkungan; 4) Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

Tujuh belas tujuan SDGs dilengkapi dengan target-target yang menggambarkan sasaran tertentu. Target-target SDGs tersebut menjadi mandat internasional yang bukan hanya harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat, tetapi juga harus diakomodasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten. Oleh karena hal itu, maka menjadi tugas BP3D Kabupaten Boyolali dalam rangka mengawal mandat tersebut ke dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah untuk mencapai target-target tujuan SDGs.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Belum tercapainya target pada periode 2011-2016 diakibatkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Belum terbangunnya sistem manajemen kinerja.
2. Belum optimalnya kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja.

3. Belum optimalnya implementasi perencanaan sektoral dan berbasis isu strategis.
4. Minimnya ketersediaan hasil penelitian untuk basis perumusan kebijakan.
5. Belum optimalnya inovasi daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka isu-isu strategis yang diangkat dalam Rencana Strategis BP3D Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
2. Belum optimalnya fungsi penelitian dan inovasi sebagai basis perumusan kebijakan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governnance*) dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, maka Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*. Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah, BP3D Kabupaten Boyolali secara pro aktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan, menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan dan memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).

##### **A. Tujuan**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan jangka menengah yang akan

dicapai oleh BP3D Kabupaten Boyolali selama tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik”.

#### B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh BP3D Kabupaten Boyolali selama tahun 2021-2026 adalah:

Sasaran:

1. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Perangkat daerah.

Dengan berpedoman terhadap visi dan misi yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah BP3D Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 beserta indikator kinerjanya, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BP3D Kabupaten Boyolali**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik		Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	800,00	823,00	833,00	893,00	903,00
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Nilai	69,13 (B)	72,13 (BB)	75,13 (BB)	77,13 (BB)
		Meningkatnya Kapasitas kelembagaan Perangkat daerah	Nilai EKPPD	Nilai	3,4000	3,4100	3,4200	3,4300
		Nilai SAKIP BP3D	Nilai	83,35	83,75	84,15	84,55	85

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD adalah strategi dan kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah PD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah PD menunjukkan bagaimana cara PD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah PD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan PD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana PD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan BP3D Kabupaten Boyolali tahun 2016-2021.

**Tabel 5**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>VISI : BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI</b> <b>“Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas”</b>			
<b>MISI 4: Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas pengendaliaan dan evaluasi pembangunan daerah</li> <li>• Peningkatan kualitas perencanaan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan</li> <li>• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah</li> <li>• Peningkatan sinergitas perencanaan di tingkat daerah dengan perangkat daerah</li> <li>• Peningkatan peran penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan</li> </ul>

**VISI : BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI**

**“Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas”**

**MISI 4: Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan kelembagaan berbasis kinerja</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja</li></ul>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

#### **6.1. Rencana Program**

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka BP3D Kabupaten Boyolali menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

#### **6.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan**

A. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
  - a) Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
  - b) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
  - c) Pelaksanaan Konsultasi Publik
  - d) Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
  - e) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
  - f) Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
  - g) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

a) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

b) Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD

c) Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

a) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

b) Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah

c) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

B. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

a) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

b) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

c) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

d) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

e) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

f) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

- g) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
  - h) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
- a) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  - b) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
  - c) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
  - d) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
  - e) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  - f) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
  - g) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
  - h) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- a) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  - b) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

- c) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- d) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
- e) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- f) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
- g) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
- h) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

### C. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
  - a) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
  - b) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat
  - c) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa
  - d) Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
  - e) Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
  - a) Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
  - b) Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- c) Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
  - d) Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
  - e) Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
  - f) Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
  - g) Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- a) Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
  - b) Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
  - c) Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
  - d) Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
  - e) Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
  - f) Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
  - g) Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
  - h) Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
  - i) Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
- a) Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
  - b) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif
  - c) Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
  - d) Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
- D. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - e) Penyediaan Bahan/Material
  - f) Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - d) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
  - e) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
5. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
  - f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**Tabel: 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan**  
**Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Terwujudnya penyelenggaran pemerintahan yang baik				Indeks Penyelenggaran Pemerintah Daerah	763,00	800,00		823,00		833,00		893,00		903,00		903,00		BP3D			
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaran pemerintahan daerah				Nilai Sakip (SDGs)	67,13	69,13		72,13		75,13		77,13		80,13		80,13		BP3D			
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALI	Percentase capaian target program	0	20,00	-	40,00	-	60,00	-	80,00	-	100,00	-	100,00		BP3D			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			AN DAN EVALUASI PEMBANGUNA N DAERAH																		
		5.01.0 2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALI AN DAN EVALUASI PEMBANGUNA N DAERAH	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan daerah	100, 00	100 ,00	210.00 0.000,0	100 ,00	414.75 0.000,0	100 ,00	781.75 0.000,0	100 ,00	871.75 0.000,0	100 ,00	669.75 0.000,0	100 ,00	2.948.0 00.000, 00	BP3D			
			Kegiatan																		
		5.01.0 2.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen Perencanaan dan Pendanaan sesuai regulasi yang tersusun Tepat waktu		3 dok	10.000. 000,00	3 dok	208.75 0.000,0 0	6 dok	481.75 0.000,0 0	5 dok	665.75 0.000,0 0	5 dok	463.75 0.000,0 0	25 dok	1.830.0 00.000, 00	BP3D			
			Sub Kegiatan																		
■	■	5.01.0 2.2.01. 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan , dan Isu Strategis	Jumlah dokumen analisis kondisi daerah		2 dok	-	2 dok	-	2 dok	-	2 dok	-	2 dok	-	10 dok		BP3D			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pembangunan Daerah																
		5.01.0 2.2.01. 02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan dokumen kebijakan lainnya		2 dok	-	2 dok	-	2 dok	-	2 dok	-	2 dok	-	10 dok		BP3D	
		5.01.0 2.2.01. 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik tepat waktu		1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	5 kali		BP3D	
		5.01.0 2.2.01. 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah unsur Keterlibatan Publik dalam Konsultasi Publik		6 unsur	-	6 unsur	-	6 unsur	-	6 unsur	-	6 unsur	-	30 unsur		BP3D	
		5.01.0 2.2.01. 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD tepat waktu		1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	5 kali		BP3D	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5.01.0 2.2.01. 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten tepat waktu		1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	5 kali		BP3D	
		5.01.0 2.2.01. 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Keterlibatan Publik dalam pelaksanaan Musrenbang		6 unsur	-	6 unsur	-	6 unsur	-	6 unsur	-	6 unsur	-	30 unsur		BP3D	
		5.01.0 2.2.01. 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Hasil Musrenbang Desa yang telah diverifikasi sesuai kewenangan dan regulasi secara tepat waktu		22 Kec	-	22 Kec	-	22 Kec	-	22 Kec	-	22 Kec	-	22 Kec		BP3D	
		5.01.0 2.2.01. 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai regulasi yang disusun tepat waktu		3 dok	10.000.000	3 dok	208.75 0.000	6 dok	481.75 0.000	6 dok	665.75 0.000	5 dok	463.75 0.000	23 dok	1.830.0 00.000	BP3D	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Kegiatan																
		5.01.0 2.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai regulasi, akurat, update sebagai baseline perencanaan	2 dok	70.000.000,00	2 dok	70.000.000,00	4 dok	70.000.000,00	4 dok	70.000.000,00	3 dok	70.000.000,00	15 Dok	350.000.000	BP3D		
			Sub Kegiatan																
		5.01.0 2.2.02. 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis data Perencanaan Pembangunan Daerah yang update	2 dok	-	2 dok	-	2 dok	-	2 dok	-	2 dok	-	10 Dok		BP3D		
		5.01.0 2.2.02. 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan	Jumlah OPD yang memiliki data update dan akurat	50 OPD	50.000.000	50 OPD	50.000.000	50 OPD	50.000.000	50 OPD	50.000.000	50 OPD	50.000.000	50 OPD	250.000.000	BP3D		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD																		
		5.01.0 2.2.02. 03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen profil daerah yang update dan akurat		2 dok	20.000.000	2 dok	20.000.000	2 dok	20.000.000	2 dok	20.000.000	2 dok	20.000.000	10 dok	100.000.000	BP3D			
			Kegiatan																BP3D		
		5.01.0 2.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang selaras, sesuai regulasi dan tepat waktu		7 dok	130.000.000,00	7 dok	136.000.000,00	7 dok	230.000.000,00	8 dok	136.000.000,00	7 dok	136.000.000,00	36 dok	768.000.000,00	BP3D			
			Sub Kegiatan																		
		5.01.0 2.2.03. 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah OPD yang menyusun dokumen/ data perencanaan		50 OPD	-	50 OPD	-	50 OPD	-	50 OPD	-	50 OPD	-	50 OPD		BP3D			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Daerah di Kabupaten/Kota	pembangunan daerah yang selaras															
		5.01.0 2.2.03. 02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah OPD yang dilakukan review Renja Renstra		50 OP D	-	50 OP D	-	50 OP D	-	50 OP D	-	50 OP D	-	50 OP D			
		5.01.0 2.2.03. 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Monev yang tersusun tepat waktu		7 laporan	130.00 0.000	7 laporan	136.00 0.000	7 laporan	230.00 0.000	7 laporan	136.00 0.000	7 laporan	136.00 0.000	35 laporan	768.00 0.000,00	BP3D	
		5.01.0 3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Percentase keterpaduan antar dokumen RPJMD dengan RKPD	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		BP3D	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian antara RKPD dan Renja	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		BP3D	
			Kegiatan															BP3D	
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Program Rkpdk/Rpjmd Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Yang konsisten		58 Program	-	59 Program	-	59 Program	-	59 Program	-	59 Program	-	59 Program	-	BP3D	
			Sub Kegiatan																
		5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD)	Jumlah program bidang pemerintahan yang dikordinasi dalam penyusunan perencanaan		36 program	-	37 program	-	37 program	-	37 program	-	37 program	-	37 program	-	BP3D	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			RPJMD dan RKPd)																
		5.01.0 3.2.01. 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah OPD bidang pemerintahan yang diasistensi dalam penyusunan perencanaan		33 OP D	-	33 OP D	-	33 OP D	-	33 OP D	-	33 OP D	-	33 OP D		BP3D	
		5.01.0 3.2.01. 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah indikator program bidang pemerintahan yang dimonitoring dan evaluasi dalam penyusunan perencanaan		77 indikator kin erja pro gra m	-	81 indikator kin erja pro gra m	-	81 indikator kin erja pro gra m	-	81 indikator kin erja pro gra m	-	81 indikator kin erja pro gra m	-	81 indikator kin erja pro gra m		BP3D	
		5.01.0 3.2.01. 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Jumlah OPD bidang pemerintahan yang yang sinergis dan		33 OP D	-	33 OP D	-	33 OP D	-	33 OP D	-	33 OP D	-	33 OP D		BP3D	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	harmonis dalam penyusunan perencanaan															
		5.01.0 3.2.01. 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah program bidang pembangunan manusia yang dikoordinasi dalam penyusunan perencanaan		22 program	-	22 program	-	22 program	-	22 program	-	22 program	-	22 program	-	BP3D	
		5.01.0 3.2.01. 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah OPD bidang pembangunan manusia yang diasistensi dalam penyusunan perencanaan		5 OPD	-	5 OPD	-	5 OPD	-	5 OPD	-	5 OPD	-	5 OPD	-	BP3D	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5.01.0 3.2.01. 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah indikator bidang pembangunan manusia yang dimonitoring evaluasi dalam penyusunan perencanaan		64 indikator kinerja program	-	74 indikator kinerja program	-	74 indikator kinerja program	-	74 indikator kinerja program	-	74 indikator kinerja program	-	74 indikator kinerja program	-	BP3D	
		5.01.0 3.2.01. 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah OPD bidang pembangunan manusia yang sinergis dan harmonis dalam penyusunan perencanaan		5 OPD	-	5 OPD	-	5 OPD	-	5 OPD	-	5 OPD	-	5 OPD	-	BP3D	
			Kegiatan																
		5.01.0 3.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Program Rkpd/Rpjmd Bidang Perekonomian dan SDA Yang Konsisten		47 program	-	64 program	-	64 program	-	64 program	-	64 program	-	64 program	-	BP3D	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Sub Kegiatan																
		5.01.0 3.2.02. 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah program bidang perekonomian yang dikoordinasi dalam penyusunan perencanaan	27 program	-	26 program	-	26 program	-	26 program	-	26 program	-	26 program	-	26 program	BP3D	
		5.01.0 3.2.02. 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah OPD bidang perekonomian yang diasistensi dalam penyusunan perencanaan	4 OPD	-	4 OPD	-	4 OPD	-	4 OPD	-	4 OPD	-	4 OPD	-	4 OPD	BP3D	
		5.01.0 3.2.02. 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah indikator bidang perekonomian yang dimonitoring evaluasi dalam penyusunan	44 indikator kerja program	-	48 indikator kerja program	-	48 indikator kerja program	-	48 indikator kerja program	-	48 indikator kerja program	-	48 indikator kerja program	-	48 indikator kerja program	BP3D	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Bidang Perekonomian	perencanaan															
		5.01.0 3.2.02. 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah OPD bidang SDA yang yang sinergis dan harmonis dalam penyusunan perencanaan		4 OP D	-	4 OP D	-	4 OP D	-	4 OP D	-	4 OP D	-	4 OP D	-	BP3D	
		5.01.0 3.2.02. 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah program bidang SDA yang dikordinasi dalam penyusunan perencanaan		20 program	-	20 program	-	20 program	-	20 program	-	20 program	-	20 program	-	BP3D	
		5.01.0 3.2.02. 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah OPD bidang SDA yang diasistensi dalam		4 OP D	-	4 OP D	-	4 OP D	-	4 OP D	-	4 OP D	-	4 OP D	-	BP3D	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Perangkat Daerah Bidang SDA	penyusunan perencanaan															
		5.01.0 3.2.02. 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah indikator bidang SDA yang dimonitoring evaluasi dalam penyusunan perencanaan		34 indikator kinerja program	-	60 indikator kinerja program	-	60 indikator kinerja program	-	60 indikator kinerja program	-	60 indikator kinerja program	-	60 indikator kinerja program	-	BP3D	
		5.01.0 3.2.02. 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah OPD bidang SDA yang yang sinergis dan harmonis dalam penyusunan perencanaan		4 OPD	-	4 OPD	-	4 OPD	-	4 OPD	-	4 OPD	-	4 OPD	-	BP3D	
			Kegiatan																
		5.01.0 3.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan	Program Rkpd/Rpjmd Bidang Infrastruktur dan		20 program	-	18 program	-	18 program	-	18 program	-	18 program	-	18 program	-	BP3D	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Kewilayahan	Kewilayahan Yang konsisten															
			Sub Kegiatan																
	5.01.0 3.2.03. 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah program bidang infrastruktur yang dikoordinasi dalam penyusunan perencanaan		15 program	-	13 program	-	13 program	-	13 program	-	13 program	-	13 program	-	BP3D		
	5.01.0 3.2.03. 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah OPD bidang infrastruktur yang diasistensi dalam penyusunan perencanaan		2 OPD	-	2 OPD	-	2 OPD	-	2 OPD	-	2 OPD	-	2 OPD	-	BP3D		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		5.01.0 3.2.03. 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah indikator bidang infrastruktur yang dimonitoring evaluasi dalam penyusunan perencanaan		24 indikator kin erja pro gra m	-	24 indikator kin erja pro gra m	-	24 indikator kin erja pro gra m	-	24 indikator kin erja pro gra m	-	24 indikator kin erja pro gra m	-	24 indikator kin erja pro gra m	-	BP3D			
		5.01.0 3.2.03. 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah OPD bidang infrastruktur yang yang sinergis dan harmonis dalam penyusunan perencanaan		2 OP D	-	2 OP D	-	2 OP D	-	2 OP D	-	2 OP D	-	2 OP D	-	BP3D			
		5.01.0 3.2.03. 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan	Jumlah program bidang kewilayahan yang dikoordinasi dalam penyusunan perencanaan		5 pro gra m	-	5 pro gra m	-	5 pro gra m	-	5 pro gra m	-	5 pro gra m	-	5 pro gra m	-	BP3D			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			RKPD)																
		5.01.0 3.2.03. 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahana	Jumlah OPD bidang kewilayahana yang diasistensi dalam penyusunan perencanaan		2 OP D	-	2 OP D	-	2 OP D	-	2 OP D	-	2 OP D	-	2 OP D	-	BP3D	
		5.01.0 3.2.03. 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahana	Jumlah indikator bidang kewilayahana yang dimonitoring evaluasi dalam penyusunan perencanaan		10 indikator kin erja pro gra m	-	10 indikator kin erja pro gra m	-	10 indikator kin erja pro gra m	-	10 indikator kin erja pro gra m	-	10 indikator kin erja pro gra m	-	10 indikator kin erja pro gra m	-	BP3D	
		5.01.0 3.2.03. 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Jumlah OPD bidang kewilayahana yang yang sinergis dan		2 OP D	-	2 OP D	-	2 OP D	-	2 OP D	-	2 OP D	-	2 OP D	-	BP3D	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahahan	harmonis dalam penyusunan perencanaan																	
	Menin gkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah			Nilai EKPPD	3419 0,00	340 00, 00		341 00, 00		342 00, 00		343 00, 00		344 00, 00		344 00, 00		BP3D			
		5.05.0 2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Prosentase policy brief bidang penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan	75,0 0	75, 00	605.00 0.000	78, 00	605.00 0.000	80, 00	605.00 0.000	83, 00	605.00 0.000	85, 00	605.00 0.000	401 ,00	3.025.0 00.000	BP3D			
			Kegiatan																		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5.05.0 2.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah kajian bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang telah disusun policy brief dan didiseminasiikan		4 kajian	180.000.000	3 kajian	180.000.000	2 kajian	230.000.000	3 kajian	180.000.000	3 kajian	180.000.000	15 kajian	950.000.000	BP3D	
			Sub Kegiatan																
		5.05.0 2.2.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah riset yang ditindaklanjuti di Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi		-	-	-	-	1 riset	100.000.000	-	-	-	1 Riset	100.000.000	BP3D		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5.05.0 2.2.01. 06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah riset yang ditindaklanjuti i Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat		1 rise t	50.000. 000								1 rise t	50.000. 000	2 Ris et	100.00 0.000	BP3D
		5.05.0 2.2.01. 11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah riset yang ditindaklanjuti i Bidang Badan Usaha Milik Desa		1 rise t	-	1 rise t	50.000. 000						2 rise t	50.000. 000	BP3D		
		5.05.0 2.2.01. 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah riset yang ditindaklanjuti i Bidang Data Kelitbangan dan Peraturan		2 rise t	130.00 0.000	2 rise t	130.00 0.000	2 rise t	130.00 0.000	2 rise t	130.00 0.000	2 rise t	130.00 0.000	10 rise t	650.00 0.000	BP3D	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5.05.0 2.2.01. 13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah riset yang ditindaklanjuti i Bidang Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan		1 rise t	-					1 rise t	50.000. 000			2 rise t	50.000. 000	BP3D	
			Kegiatan																
		5.05.0 2.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah kajian bidang sosial dan kependudukan yang telah disusun policy brief dan didiseminasi		2 kaji an	-	2 kaji an	150.00 0.000,0 0	2 kaji an	150.00 0.000,0 0	3 kaji an	250.00 0.000,0 0	4 kaji an	275.00 0.000,0 0	13 kaji an	825.00 0.000	BP3D	
			Sub Kegiatan																

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		5.05.0 2.2.02. 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Aspek-Aspek Sosial								1 rise t	100.00 0.000	1 rise t	100.00 0.000	2 rise t	200.00 0.000	BP3D		
		5.05.0 2.2.02. 02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					-			1 rise t	50.000. 000		-	1 rise t	50.000. 000	BP3D		
		5.05.0 2.2.02. 03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Pendidikan dan Kebudayaan							1 rise t	75.000. 000		-		1 rise t	75.000. 000	BP3D		
		5.05.0 2.2.02. 04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Kepemudaan dan Olahraga					-		1 rise t	75.000. 000		-	1 rise t	50.000. 000	2 rise t	125.00 0.000	BP3D	
		5.05.0 2.2.02.	Penelitian dan	Jumlah riset yang		1 rise	-	1 rise	75.000.					1 rise	75.000.	3 rise	150.00	BP3D		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		05	Pengembangan Pariwisata	ditindaklanjuti Bidang Pariwisata		t		t	000					t	000	t	0.000			
		5.05.0 2.2.02. 06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Kesehatan					-				1 rise t	100.00 0.000		-	1 rise t	100.00 0.000	BP3D	
		5.05.0 2.2.02. 09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah riset yang ditindaklanjuti Bidang Tenaga Kerja		1 rise t	-	1 rise t	75.000. 000				1 rise t	50.000. 000	3 rise t	125.00 0.000	BP3D			
			Kegiatan																	
		5.05.0 2.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah kajian bidang ekonomi dan pembangunan yang telah disusun policy brief dan didiseminasi kan		2 kajian	425.00 0.000,0 0	3 kajian	275.00 0.000,0 0	3 kajian	225.00 0.000,0 0	2 kajian	175.00 0.000,0 0	2 kajian	150.00 0.000,0 0	12 kajian	1.250.0 00.000	BP3D		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Sub Kegiatan																
		5.05.0 2.2.03. 01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah riset yang ditindaklanjuti i Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		1 rise t	75.000. 000								1 rise t	75.000. 000	2 rise t	150.00 0.000	BP3D
		5.05.0 2.2.03. 02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah riset yang ditindaklanjuti i Bidang Perindustrian dan Perdagangan		1 rise t	100.00 0.000	1 rise t	75.000. 000		-		-	-	2 rise t	175.00 0.000	BP3D		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		5.05.0 2.2.03. 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah riset yang ditindaklanjuti i Bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan		1 rise t	100.00 0.000	1 rise t	100.00 0.000							2 rise t	200.00 0.000	BP3D		
		5.05.0 2.2.03. 05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah riset yang ditindaklanjuti i Bidang Kelautan dan Perikanan			-		-		1 rise t	75.000. 000		-		-	1 rise t	75.000. 000	BP3D	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5.05.0 2.2.03. 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah riset yang ditindaklanjuti i Bidang Lingkungan Hidup		0 Riset	75.000.000									0 Riset	75.000.000	BP3D	
		5.05.0 2.2.03. 09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah riset yang ditindaklanjuti i Bidang Pekerjaan Umum		0 Riset	100.000.000									0 Riset	100.000.000	BP3D	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5.05.0 2.2.03. 10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah riset yang ditindaklanjuti i Bidang Perhubungan		0 Riset	75.000.000									0 Riset	75.000.000	BP3D	
		5.05.0 2.2.03. 11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah riset yang ditindaklanjuti i Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			-	1 riset	75.000.000	4 riset	300.000.000	BP3D							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5.05.0 2.2.03. 12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah riset yang ditindaklanjuti i Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan			-		-		-	1 rise t	100.00 0.000		-	1 rise t	100.00 0.000	BP3D	
		5.05.0 2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan	70,0 0	75, 00	400.00 0.000	78, 00	400.00 0.000	80, 00	400.00 0.000	83, 00	400.00 0.000	85, 00	400.00 0.000	#REF!	2.000.0 00.000	BP3D	
			Kegiatan																

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5.05.0 2.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi yang masuk/diajuki dalam database daerah		5 inovasi	400.000.000	7 inovasi	400.000.000	10 inovasi	400.000.000	10 inovasi	400.000.000	10 inovasi	400.000.000	42 Inovasi	2.000.000.000	BP3D	
			Sub Kegiatan																
		5.05.0 2.2.04. 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah inovasi bidang teknologi dan perekayasaan		7 inovasi	200.000.000	7 inovasi	200.000.000	7 inovasi	200.000.000	7 inovasi	200.000.000	7 inovasi	200.000.000	35 inovasi	1.000.000.000	BP3D	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		5.05.0 2.2.04. 03	<b>Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif</b>	Jumlah inovasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang didiseminasi			-		-		-		-		-			BP3D			
		5.05.0 2.2.04. 04	<b>Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan</b>	Jumlah Inovasi yang disosialisasikan dan didiseminasi		3 inovasi	100.000.000	3 inovasi	100.000.000	3 inovasi	100.000.000	3 inovasi	100.000.000	3 inovasi	100.000.000	15 inovasi	500.000.000	BP3D			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5.05.0 2.2.04. 05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah inovasi yang mendapatkan fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual		3 inovasi	100.000.000	3 inovasi	100.000.000	3 inovasi	100.000.000	3 inovasi	100.000.000	3 inovasi	100.000.000	15 inovasi	500.000.000	BP3D	
	Menin gkatny a Kapasi tas kelemb agaan Perang kat daerah			Nilai SAKIP BP3D	82,95	83,35		83,75		84,15		84,55		85,00		85,00		BP3D	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar	100,00	100,00	6.385.55.000	100,00	5.970.805.000	100,00	6.115.805.000	100,00	6.118.305.000	100,00	6.108.305.000	100,00	30.698.775.000	BP3D			
			Kegiatan																		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	12 bulan	12 bulan	4.829.403.000,00	12 bulan	4.829.403.000,00	12 bulan	4.829.403.000,00	12 bulan	4.829.403.000,00	12 bulan	4.829.403.000,00	60 Bulan	24.147.015.000	BP3D			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Sub Kegiatan																		
		X.XX.0 1.2.02. 01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN		14 bulan	4.450.2 03.000	14 bulan	4.450.2 03.000	14 bulan	4.450.2 03.000	14 bulan	4.450.2 03.000	14 bulan	4.450.2 03.000	70 Bulan	22.251.015.000	BP3D			
		X.XX.0 1.2.02. 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jasa administrasi perkantoran (PTT)		12 bulan	379.20 0.000	12 bulan	379.20 0.000	12 bulan	379.20 0.000	12 bulan	379.20 0.000	12 bulan	379.20 0.000	60 Bulan	1.896.0 00.000	BP3D			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		X.XX.0 1.2.02. 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		60 Bulan		BP3D	
		X.XX.0 1.2.02. 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Akuntansi SKPD		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		60 Bulan		BP3D	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		X.XX.0 1.2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		18 laporan	-	18 laporan	-	18 laporan	-	18 laporan	-	18 laporan	-	90 laporan	-	BP3D	
		X.XX.0 1.2.02. 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan		2 bahan	-	2 bahan	-	2 bahan	-	2 bahan	-	2 bahan	-	10 bahan	-	BP3D	
			Kegiatan																

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		X.XX.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		12 bulan	489.35 2.000,00	12 bulan	591.85 2.000,00	12 bulan	591.85 2.000,00	12 bulan	639.35 2.000,00	12 bulan	644.35 2.000,00	60 Bulan	2.956.760.000	BP3D	
			Sub Kegiatan																
		X.XX.0 1.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor		12 bulan	3.000.00	12 bulan	3.000.00	12 bulan	3.000.00	12 bulan	3.000.00	12 bulan	3.000.00	60 Bulan	15.000.000	BP3D	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		X.XX.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		60 Bulan		BP3D	
		X.XX.0 1.2.06. 03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga kantor		12 bulan	3.000.00	12 bulan	3.000.00	12 bulan	3.000.00	12 bulan	3.000.00	12 bulan	3.000.00	60 Bulan	15.000.000	BP3D	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		X.XX.0 1.2.06. 04	Penyediaan bahan logistik kantor	Bahan logistik kantor		12 bulan	40.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	40.000.000	60 Bulan	200.000.000	BP3D	
		X.XX.0 1.2.06. 05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan		12 bulan	74.488.000	12 bulan	76.988.000	60 Bulan	382.440.000	BP3D							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		X.XX.0 1.2.06. 07	Penyediaan bahan / Material	Alat tulis kantor		12 bulan	132.99 7.000	12 bulan	232.99 7.000	12 bulan	232.99 7.000	12 bulan	280.49 7.000	12 bulan	285.49 7.000	60 Bulan	1.164.9 85.000	BP3D	
		X.XX.0 1.2.06. 08	Fasilitasi kunjungan tamu	Kebutuhan makan minum kantor		12 bulan	135.86 7.000	12 bulan	135.86 7.000	12 bulan	135.86 7.000	12 bulan	135.86 7.000	12 bulan	135.86 7.000	60 Bulan	679.33 5.000	BP3D	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		X.XX.0 1.2.06.09	Penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		12 bulan	100.00 0.000	12 bulan	100.00 0.000	12 bulan	100.00 0.000	12 bulan	100.00 0.000	12 bulan	100.00 0.000	60 Bulan	500.00 0.000	BP3D	
			Kegiatan																
		X.XX.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi		12 bulan	632.05 0.000,00	12 bulan	319.55 0.000,00	12 bulan	464.55 0.000,00	12 bulan	419.55 0.000,00	12 bulan	404.55 0.000,00	60 Bulan	2.240.250.000	BP3D	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Sub Kegiatan																
		X.XX.0 1.2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat		12 bulan	1.000.00	12 bulan	1.000.00	12 bulan	1.000.00	12 bulan	1.000.00	12 bulan	1.000.00	60 Bulan	5.000.00	BP3D	
		X.XX.0 1.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 bulan	96.000.000	12 bulan	96.000.000	12 bulan	96.000.000	12 bulan	96.000.000	12 bulan	96.000.000	60 Bulan	480.000.000	BP3D	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		X.XX.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Transaksi-transaksi keuangan SKPD		12 bulan	535.05 0.000	12 bulan	222.55 0.000	12 bulan	367.55 0.000	12 bulan	322.55 0.000	12 bulan	307.55 0.000	60 Bulan	1.755.2 50.000	BP3D	
			Kegiatan																
		X.XX.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi baik		12 bulan	290.00 0.000,0 0	12 bulan	230.00 0.000,0 0	60 Bulan	1.210.0 00.000	BP3D							
			Sub Kegiatan																

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		X.XX.0 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		12 bulan	70.000.000	12 bulan	70.000.000	12 bulan	70.000.000	12 bulan	70.000.000	12 bulan	70.000.000	60 Bulan	350.000.000	BP3D	
		X.XX.0 1.2.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan perlengkapan kantor		12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	60 Bulan	100.000.000	BP3D	
		X.XX.0 1.2.09. 09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kebutuhan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor		12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	60 Bulan	500.000.000	BP3D	
		X.XX.0 1.2.09. 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			-	1 aplikasi	40.000.000	4 aplikasi	160.000.000	BP3D							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		X.XX.0 1.2.09. 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		1 aplikasi	100.00 0.000		-		-		-		-		1 aplikasi	100.00 0.000	BP3D	
			Kegiatan																	
		X.XX.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat		25	144.75 0.000	25	-	25	-	25	-	25	-	125	-	BP3D		
			Sub Kegiatan																	
		X.XX.0 1.2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun		2	138.75 0.000	2	-	2	-	2	-	2	-	10	-	BP3D		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		X.XX.0 1.2.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun		1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	-	BP3D	
		X.XX.0 1.2.01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun		1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	-	BP3D	
		X.XX.0 1.2.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan-SKPD yang disusun		1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	-	BP3D	
		X.XX.0 1.2.01. 05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan-SKPD yang disusun		1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	-	BP3D	
		X.XX.0 1.2.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun		15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	75	-	BP3D	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Tahun 2026			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Kinerja SKPD																
		X.XX.0 1.2.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah		4	6.000.0 00	4	-	4	-	4	-	4	-	20	-	BP3D	
Pagu Total							7.600.5 55.000		7.390.5 55.000		7.902.5 55.000		7.995.0 55.000		7.783.0 55.000		38.575. 275.00 0		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarnya. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja BP3D Kabupaten Boyolali yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel : 7

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan  
Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Nilai SAKIP	67,13 (B)	69,13 (B)	72,13 (BB)	75,13 (BB)	77,13 (BB)	80,13 (A)	80,13 (A)	

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Nilai EKPPD	34190.00	3400.00	34100.00	34200.00	34300.00	34400.00	34400.00

## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali. Renstra berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026.

Dalam rangka mencapai target perencanaan yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, maka dibutuhkan peran aktif *stakeholder*. Rencana Strategis yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan. Diharapkan Rencana Strategis BP3D Kabupaten Boyolali ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali " **BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas**".

Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan BP3D Kabupaten Boyolali. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra, setiap tahun akan dilakukan evaluasi dan jika diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra BP3D Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

